

LAPORAN KINERJA

**BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN
TAHUN 2024**



**BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2025**

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAKIN UNIT KERJA LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Unit Kerja lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi Tanggung jawab manajemen Unit Kerja lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja tersebut.

Jakarta, 17 Januari 2025

Koordinator Tim Reviu



Kapoksi PE PSI PKH



Kapoksi PE PSI TP



Kapoksi PE BBPSI Mektan

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN TAHUN 2024

TIM PENYUSUN:

Tim Penyusun LAKIN BBPSI SDLP



**BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
2025**

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian (BBPSI SDLP) Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai lingkup BBPSI SDLP dalam mendukung pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja BBPSI SDLP disusun berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) BBPSI SDLP TA. 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP). Pada dokumen PK tersebut ditetapkan 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang ingin dicapai oleh BBPSI SDLP pada TA 2024. Sasaran kinerja tersebut dicapai melalui kerja keras Balai lingkup BBPSI SDLP (yakni: BBPSI SDLP, BPSI Pertanian Lahan Rawa, BPSI Tanah dan Pupuk, BPSI Agroklimat dan Hidrologi Pertanian, BPSI Lingkungan Pertanian).

Diharapkan Laporan Kinerja BBPSI SDLP ini dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan program. Selain itu menjadi umpan balik guna memperbaiki dan meningkatkan kinerja lingkup BBPSI SDLP selanjutnya.

Penghargaan dan ucapan terima kasih saya sampaikan kepada pelaksana kegiatan yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan laporan ini. Saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan, semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.



Bogor, Januari 2025
Kepala Balai Besar,

Asdianto, SP., MT.
NIP 197801012002121006

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, BBPSI SDLP mempunyai tugas untuk melaksanakan Pengujian standar instrumen Sumberdaya lahan (SDL) dan perubahan iklim pertanian (Pasal 18); serta menyelenggarakan fungsi (Pasal 19): (a) Pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran pengujian standar instrumen SDL dan Perubahan iklim pertanian; (b) Pelaksanaan analisis, pengujian dan tindakan korektif Pengujian standar instrumen Sumberdaya lahan dan perubahan iklim pertanian; (c) Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi Sumberdaya lahan dan perubahan iklim pertanian; (d) Pelaksanaan layanan Pengujian, kalibrasi dan penilaian kesesuaian standar instrumen Sumberdaya lahan dan perubahan iklim pertanian; (e) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi geospasial tematik pertanian; (f) Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standar instrumen sumberdaya lahan dan perubahan iklim pertanian; (g) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen Sumberdaya lahan dan perubahan iklim pertanian; dan (h) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBPSI SDLP.

BBPSI SDLP juga mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengujian standar instrumen pertanian dari UPT yang berada dibawahnya yang bersifat lintas sumber daya yaitu di bidang lahan dan perubahan iklim (BBPSI SDLP), tanah dan pupuk (BPSI Tanah dan Pupuk), Agroklimat dan Hidrologi (BPSI Agroklimat dan Hidrologi Pertanian), lahan rawa (BPSI Pertanian Lahan Rawa), dan lingkungan pertanian (BPSI Lingkungan Pertanian). Koordinasi tersebut perlu dilakukan untuk menghindari adanya *overlapping* kegiatan di masing-masing satuan kerja.

Standar penilaian Laporan Kinerja tahun 2024 tidak hanya mengacu pada *output* (keluaran) hasil kegiatan, tetapi berdasarkan *outcome* (dampak, manfaat jangka menengah dan panjang). Indikator Kinerja yang ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2024 terdiri dari 3 (tiga) sasaran kegiatan dan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan target-target capaian berupa (i) Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan; (ii) Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian; (iii) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPSI SDLP pada tahun 2024 mencapai rata-rata **106,31%**. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan pencapaian kinerjanya hingga bulan Desember 2024 adalah **SANGAT BERHASIL**. Sedangkan dalam pemanfaatan anggaran, BBPSI SDLP mampu menyerap anggaran sebesar **89,06%** dari total yang dialokasikan.

Keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2024 disebabkan Kerjasama yang baik antara pihak manajemen dengan pelaksanaan kegiatan, ketersediaan sarana

dan prasarana yang memadai, kesiapan dokumen perencanaan, serta adanya kegiatan monitoring dan evaluasi yang terencana. Namun demikian dalam perencanaan indikator kinerja tahun 2024 terdapat beberapa kendala yang secara aktif telah diperbaiki dengan mengoptimalkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi serta sosialisasi peningkatan kapasitas dan pembinaan SDM.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
I. PENDAHULUAN.....	1
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	4
2.1. Perencanaan Strategis.....	4
2.1.1. Visi.....	4
2.1.2. Misi.....	4
2.1.3. Tujuan dan Sasaran Kegiatan.....	4
2.1.4. Arah Kebijakan.....	5
2.1.5. Strategi.....	5
2.1.6. Program dan Kegiatan.....	7
2.2. Indikator Kinerja Utama.....	8
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	8
III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	10
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	10
3.1.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024.....	10
3.2. Analisis Capaian Kinerja.....	11
3.2.1. Capaian Kinerja Tahun Berjalan.....	11
3.2.2. Pengukuran Capaian Kinerja dengan Renstra 2022-2024.....	17
3.2.3. Keberhasilan.....	18
3.2.4. Kendala dan Langkah Antisipasi.....	18
3.2.5. Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumberdaya.....	19
3.3. Capaian Kinerja Lainnya.....	21
3.3.1. Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015.....	21
3.3.2. Keterbukaan Informasi Publik.....	21
3.3.3. LS Pro BBPSI SDLP.....	23
3.3.4. SISCrop.....	26
3.3.5. Penghargaan Komite Teknis 65-23 Sumber Daya Lahan Pertanian.....	27
3.4. Akuntabilitas Keuangan.....	28
3.4.1. Realisasi Anggaran.....	29
3.4.2. PNBP.....	30
PENUTUP.....	32
LAMPIRAN.....	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	KRO-RO BBPSI SDLP TA.2024.....	7
Tabel 2.	Indikator Kinerja Utama BBPSI SDLP Tahun 2024.....	8
Tabel 3.	Perjanjian Kinerja BBPSI SDLP Tahun 2024.....	8
Tabel 4.	Capaian Kinerja Indikator Sasaran BBPSI SDLP Tahun 2024...	11
Tabel 5.	Rincian Dokumen RSNI3 yang dihasilkan BBPSI SDLP Tahun 2024.....	12
Tabel 6.	Perbandingan Capaian IKU 1 Tahun 2023-2024.....	14
Tabel 7.	Hasil Penilaian ZI BBPSI SDLP.....	15
Tabel 8.	Perbandingan Capaian IKU 2 Tahun 2023-2024.....	15
Tabel 9.	Perbandingan Capaian IKU 3 Tahun 2023-2024.....	16
Tabel 10.	Perbandingan Capaian Kinerja Renstra 2023-2024.....	17
Tabel 11.	Kendala dan Langkah Antisipasi.....	18
Tabel 12.	Nilai Efisiensi Kinerja Indikator Kinerja Utama BBPSI SDLP TA.2024.....	20
Tabel 13.	Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Lingkup BBPSI SDLP Tanggal 31 Desember 2024.....	30
Tabel 14.	Target dan Realisasi PNBK Lingkup BBPSI SDLP Tahun 2024..	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Komposisi SDM Lingkup BBPSI SDLP Berdasarkan Jenjang Pendidikan, Desember 2024.....	2
Gambar 2.	Pelaksanaan Audit Internal Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015.....	21
Gambar 3.	Maklumat Pelayanan BBPSI SDLP.....	22
Gambar 4.	Penandatanganan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik	22
Gambar 5.	Penerimaan Penghargaan sebagai Unit Kerja dengan Predikat Informatif.....	23
Gambar 6.	Sosialisasi LS Pro BBPSI SDLP.....	23
Gambar 7.	Pelatihan Lead Auditor LS Pro BBPSI SDLP.....	24
Gambar 8.	BBPSI SDLP <i>Benchmarking</i> ke BBSPJI Tekstil Bandung.....	25
Gambar 9.	Pelatihan Manajemen Risiko LS Pro BBPSI SDLP.....	25
Gambar 10.	Pemanfaatan SISCrop dengan Bappenas.....	26
Gambar 11.	BBPSI SDLP Menjadi Narasumber Terkait Pengembangan SISCrop.....	26
Gambar 12.	Data 15 Harian SISCrop Dibagikan di Media Sosial BBPSI SDLP.....	27
Gambar 13.	Piagam Penghargaan atas Keikutsertaan dalam Seleksi <i>Herudi Technical Committee Award</i> Tahun 2024.....	27
Gambar 14.	Proporsi Anggaran APBN Per Satker Lingkup BBPSI SDLP 2024.....	28
Gambar 15.	Perbandingan Proporsi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja.....	29

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Struktur Organisasi BBPSI SDLP.....	34
Lampiran 2.	Rekapitulasi Pegawai Lingkup BBPSI SDLP Berdasarkan Pendidikan Per Desember 2024.....	35
Lampiran 3.	Data Kepegawaian Sebaran SDM Lingkup BBPSI SDLP Berdasarkan Jenjang Fungsional Per Desember 2024.....	36
Lampiran 4.	Perjanjian Kinerja BBPSI SDLP Tahun 2024.....	40
Lampiran 5.	Manual IKU BBPSI SDLP Tahun 2024.....	42
Lampiran 6.	SK Penilaian Mandiri Zona Integritas (ZI) Tahun 2024.....	44
Lampiran 7.	Indikator Pelaksanaan Anggaran.....	51
Lampiran 8.	SK Tim Penyusun LAKIN BBPSI SDLP 2024.....	52
Lampiran 9.	Nilai Efisiensi Kinerja Indikator Kinerja Utama BBPSI SDLP TA.2024.....	56
Lampiran 10.	Rencana Aksi BBPSI SDLP TA.2024.....	57

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian terkait pembentukan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian. Semua Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Badan Litbang Pertanian) bertransformasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, termasuk didalamnya Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian (BBPSI SDLP) yang bertanggung jawab kepada BSIP. Adapun BBPSI SDLP sebelumnya merupakan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP).

Dalam Permentan yang sama, BBPSI SDLP mempunyai tugas untuk melaksanakan Pengujian standar instrumen Sumberdaya lahan (SDL) dan perubahan iklim pertanian (Pasal 18); serta menyelenggarakan fungsi (Pasal 19): (a) Pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran pengujian standar instrumen SDL dan Perubahan iklim pertanian; (b) Pelaksanaan analisis, pengujian dan tindakan korektif Pengujian standar instrumen Sumberdaya lahan dan perubahan iklim pertanian; (c) Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi Sumberdaya lahan dan perubahan iklim pertanian; (d) Pelaksanaan layanan Pengujian, kalibrasi dan penilaian kesesuaian standar instrumen Sumberdaya lahan dan perubahan iklim pertanian; (e) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi geospasial tematik pertanian; (f) Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standar instrumen sumberdaya lahan dan perubahan iklim pertanian; (g) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen Sumberdaya lahan dan perubahan iklim pertanian; dan (h) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBPSI SDLP.

BBPSI SDLP juga mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengujian standar instrumen pertanian dari UPT yang berada dibawahnya yang bersifat lintas sumber daya yaitu di bidang lahan dan perubahan iklim (BBPSI SDLP), tanah dan pupuk (BPSI Tanah dan Pupuk), Agroklimat dan Hidrologi (BPSI Agroklimat dan Hidrologi Pertanian), lahan rawa (BPSI Pertanian Lahan Rawa), dan lingkungan pertanian (BPSI Lingkungan Pertanian). Koordinasi tersebut perlu dilakukan untuk menghindari adanya *overlapping* kegiatan di masing-masing satuan kerja.

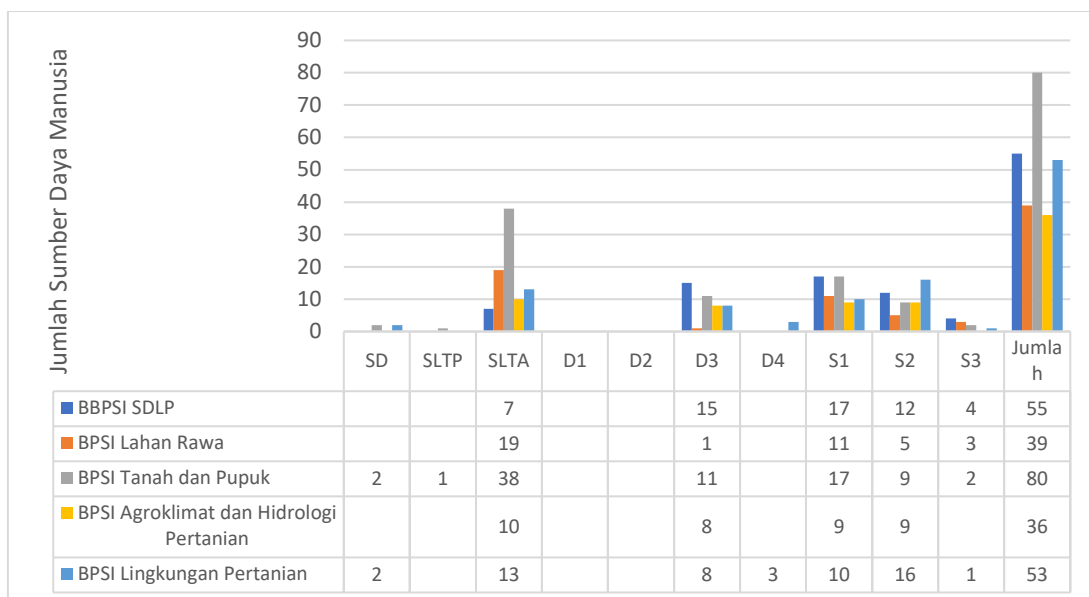
Dengan paradigma baru ini maka orientasi kerja BBPSI SDLP adalah meningkatkan peran, kemampuan, dan manfaat BBPSI SDLP dan lingkup koordinasinya untuk mendorong dan menghela pembangunan pertanian yang berbasis pengujian standar instrumen pertanian yang berkaitan dengan bidang sumber daya lahan pertanian dan mencakup aspek tanah, agroklimat dan

hidrologi, lahan rawa serta lingkungan pertanian yang berorientasi kepada kebutuhan pengguna (*user oriented*).

Hubungan dan mekanisme kerja dengan institusi di luar Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang menangani aspek lahan, seperti Badan Standardisasi Nasional (BSN), Badan Informasi Geospasial (BIG), Direktorat Perkebunan (Ditjenbun), Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dan Perguruan Tinggi (PT) diselenggarakan dengan mekanisme kerjasama atau jejaring konsorsium.

Dalam menjalankan perannya, permasalahan yang dihadapi semakin kompleks, seperti: 1) terjadinya degradasi sumberdaya lahan dan pencemaran, 2) alih fungsi lahan, 3) *land rent* dan fragmentasi lahan, 4) pemanasan global dan perubahan iklim, 5) meluasnya lahan terlantar, dan 6) masih rendahnya diseminasi inovasi teknologi pertanian. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, BBPSI SDLP beserta balai-balai di bawah koordinasinya, sedang dan akan terus berinisiatif melakukan langkah-langkah visioner melalui optimalisasi pemanfaatan dan peningkatan sumberdaya yang dimiliki.

Peran BBPSI SDLP yang semakin besar dan strategis harus didukung oleh sumberdaya yang memadai, baik Sumberdaya Manusia (SDM), pendanaan, maupun sarana-prasarana. Berdasarkan data per 17 Desember 2024, jumlah (total) SDM lingkup BBPSI SDLP sebanyak 263 orang dengan komposisi SDM menurut pendidikan terakhir seperti disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Komposisi SDM Lingkup BBPSI SDLP Berdasarkan Jenjang Pendidikan, Desember 2024

Pelaksanaan tugas dan fungsi serta program BBPSI SDLP didukung oleh sarana dan prasarana, seperti Laboratorium Informasi Geospasial dan Analisis Sistem (IGAS), *Agriculture War Room* (AWR), Laboratorium Tanah, Rumah Kaca, dan Kebun Percobaan (KP). Laboratorium IGAS berada di Bogor di bawah koordinasi BBPSI SDLP. Fasilitas laboratorium yang ada di BBPSI SDLP lingkup sebagai berikut:

- Laboratorium Mineralogi Tanah (di bawah koordinasi BBPSI SDLP),
- Laboratorium Tanah, Laboratorium Pengujian Tanah, dan Laboratorium Fisika dan Biologi Tanah (di bawah koordinasi BPSI Tanah dan Pupuk),
- Laboratorium Tanah, Air dan Tanaman, Laboratorium Mikrobiologi (di bawah koordinasi BPSI Pertanian Lahan Rawa)
- Laboratorium Gas Rumah Kaca (GRK), Laboratorium Residu Bahan Agrokimia (Laboratorium RBA), dan Laboratorium Terpadu. (di bawah koordinasi BPSI Lingkungan Pertanian).

Laboratorium GRK dilengkapi dengan peralatan *Gas Chromatography* (GC) tipe 8A yang mampu menganalisa gas CH₄ dan 14A untuk menganalisa gas CO₂ dan N₂O. Disamping itu untuk mendapatkan data GRK secara cepat, BBSDLP mempunyai GC portabel yang dapat digunakan langsung di lapangan. Laboratorium Terpadu berfungsi melaksanakan analisis logam berat, residu pestisida, tanah rutin, dan bahan pencemar lain.

Kebun Percobaan terdapat di empat Balai, yaitu KP Lahan Kering Masam di Tamanbogo, Lampung, KP Lahan Rawa di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, KP Jakenan, Jawa Tengah. Disamping itu terdapat Taman Sains Pertanian (TSP), masing-masing di Balittra dan Balingtan. Seluruh aset tersebut terus dioptimalkan pemanfaatannya. KP Lahan Rawa Banjarbaru, terdiri atas:

- KP. Belandean berupa lahan rawa pasang surut tipe B,
- KP. Banjarbaru berupa lahan rawa lebak, tadah hujan,
- KP. Handil Manarap berupa lahan tadah hujan,
- KP. Binuang berupa lahan kering, tadah hujan dan lebak, dan
- KP. Tanggul/Tawar berupa lahan rawa lebak dangkal dan tengahan.

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis (Renstra) BBPSI SDLP pada tahun 2023 acuan bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkup BBPSI SDLP dalam merencanakan dan melaksanakan standardisasi sumberdaya lahan pertanian 2023 secara menyeluruh, terintegrasi, dan sinergis, baik di dalam maupun antar subsektor terkait. Penyusunan Renstra BBPSI SDLP mengacu kepada: 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 2) Rencana Pembangunan Pertanian Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025, 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, 4) Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, dan 5) Renstra BSIP Tahun 2023. Secara operasional, Renstra ini menjadi acuan dalam penyusunan Renstra UPT lingkup BBPSI SDLP yang dalam penjabarannya disesuaikan dengan dinamika strategi pembangunan nasional dan respon *stakeholders*.

Dalam perkembangan di dunia sekarang ini dibutuhkan standar instrumen sumberdaya lahan pertanian. Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian (BSIP SDLP) lahir pada tanggal 05 Juni 2023 melalui Permentan RI No. 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup BSIP. Sebagai Unit Kerja Eselon II di bawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), BSIP SDLP memiliki tugas koordinasi, perencanaan, penyusunan data, penerapan, pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen sumberdaya lahan pertanian dan terkait perubahan iklim di sektor pertanian.

2.1. Perencanaan Strategis

2.1.1. Visi

Menjadi lembaga standardisasi sumberdaya lahan pertanian terkemuka bertaraf internasional yang akuntabel, kolaboratif, berintegritas, berorientasi pelayanan prima mendukung pertanian maju, mandiri, dan modern.

2.1.2. Misi

- 1) Meningkatkan standar mutu proses dan produk standar pertanian berkelanjutan serta berdaya saing;
- 2) Meningkatkan pemanfaatan instrumen pertanian terstandar;
- 3) Meningkatkan transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Tujuan utama BBPSI SDLP tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran pengujian standar instrumen SDL dan Perubahan iklim pertanian;
- 2) Melaksanakan analisis, pengujian dan tindakan korektif Pengujian standar instrumen Sumberdaya lahan dan perubahan iklim pertanian;

- 3) Mengelola produk instrumen hasil standardisasi Sumberdaya lahan dan perubahan iklim pertanian;
- 4) Melaksanakan layanan Pengujian, kalibrasi dan penilaian kesesuaian standar instrumen Sumberdaya lahan dan perubahan iklim pertanian;
- 5) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi geospasial tematik pertanian;
- 6) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standar instrumen sumberdaya lahan dan perubahan iklim pertanian;
- 7) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen Sumberdaya lahan dan perubahan iklim pertanian; dan
- 8) Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga BBPSI SDLP.

2.1.4. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian (BBPSI SDLP) mengacu pada arah kebijakan pembangunan pertanian yang berlandaskan RPJM 2020-2024, sebagai penjabaran dari Visi, Program Aksi Presiden/Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, serta berpedoman pada RPJPN 2005-2025. Arah Kebijakan BBPSI SDLP adalah:

- 1) Meningkatkan pelaksanaan analisis, pengujian dan tindakan korektif Pengujian standar instrumen Sumberdaya lahan dan perubahan iklim pertanian;
- 2) Mendorong pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi Sumberdaya lahan dan perubahan iklim pertanian;
- 3) Mendorong pelayanan Pengujian, kalibrasi dan penilaian kesesuaian standar instrumen Sumberdaya lahan dan perubahan iklim pertanian;
- 4) Mendorong Pengelolaan data dan informasi geospasial tematik pertanian;
- 5) Mendorong pelaksanaan/ pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standar instrumen sumberdaya lahan dan perubahan iklim pertanian;
- 6) Merumuskan rekomendasi kebijakan, organisasi, dan kelembagaan terutama berkaitan dengan peningkatan efektivitas sinergi program Standardisasi Sumberdaya Lahan Pertanian;
- 7) Mendorong pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran pengujian standar instrumen SDL dan Perubahan Iklim Pertanian;
- 8) Mendorong pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen Sumberdaya lahan dan perubahan iklim pertanian; dan
- 9) Mendorong pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBPSI SDLP.

2.1.5. Strategi

Strategi umum BBPSI SDLP untuk mewujudkan visi pembangunan pertanian adalah:

- 1) Agro Standar
Merupakan program strategis dalam menciptakan dan mengembangkan standardisasi instrumen pertanian (lahan, air, pupuk dan pemupukan, dll)

dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada seluruh stakeholder bidang pertanian menghadapi era persaingan global untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui sektor pertanian yang maju, mandiri dan modern.

- 2) Pengujian Instrumen Pertanian
BBPSI SDLP membantu BSIP melaksanakan program pengujian instrumen pertanian. Instrumen pertanian antara lain: 1) sarana budi daya (berupa lahan, air, benih, pupuk, pestisida); 2) unit pelayanan teknis standar pertanian dan UPBS; 3) dokumen resmi seperti standar, rekomendasi, pedoman umum, kebijakan.
- 3) Penilaian Kesesuaian Standar Instrumen Pertanian
Badan Standardisasi Instrumen Pertanian melakukan penilaian kesesuaian melalui kegiatan pengujian, inspeksi, dan/atau Sertifikasi untuk menyatakan bahwa suatu instrumen pertanian (barang, jasa, sistem, proses, dan personal) telah sesuai dengan Persyaratan Acuan.

Kemudian strategi BBPSI SDLP dalam menjalankan tugas utamanya yaitu standardisasi dan instrumen sumberdaya lahan pertanian, pemantauan perubahan iklim sektor pertanian, dan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Sumberdaya Lahan Pertanian, didetailkan sebagai berikut:

Standardisasi Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian

Strategi:

- 1) Pengembangan dan penyusunan standar
 - Melibatkan ahli dan pemangku kepentingan dalam pengembangan standar instrument sumberdaya lahan
 - Menyusun pedoman teknis yang jelas dan mudah dimengerti untuk penerapan standar
- 2) Pelatihan dan sosialisasi
 - Mengadakan pelatihan rutin untuk petani, praktisi, dan teknisi pertanian tentang penerapan standar
 - Menggelar kampanye sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya standardisasi instrumen
- 3) Kerjasama dan kemitraan
 - Berkolaborasi dengan lembaga penelitian, pemerintah, dan sektor swasta untuk memastikan relevansi dan penerapan standar
 - Membangun kemitraan dengan industri teknologi untuk mengintegrasikan inovasi baru dalam instrument sumberdaya lahan
- 4) Pemantauan dan evaluasi
 - Menetapkan mekanisme pemantauan yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap standar
 - Melakukan evaluasi berkala untuk menyesuaikan standar dengan perkembangan terkini di bidang teknologi ilmu pengetahuan
- 5) Penelitian dan inovasi
 - Mendukung riset untuk terus meningkatkan standar dan instrument yang digunakan dalam pemantauan sumberdaya lahan

- Mendorong adopsi teknologi terkini dan inovasi dalam instrument pengukuran

Perubahan Iklim Sektor Pertanian Strategi:

- 1) Penggunaan teknologi prediksi dan pemodelan iklim;
- 2) Penyusunan rencana adaptasi dan mitigasi yang spesifik untuk berbagai ekosistem pertanian;
- 3) Edukasi dan pelatihan untuk petani tentang praktik pertanian cerdas iklim.

Informasi Geospasial Tematik (IGT) Sumberdaya Lahan Pertanian Strategi:

- 1) Pengembangan platform data geospasial yang mudah diakses dan digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan;
- 2) Kerjasama dengan institusi riset untuk meningkatkan kualitas dan cakupan data geospasial;
- 3) Pelatihan dan pendidikan bagi petani dan teknis pertanian tentang pemanfaatan data IGT.

2.1.6. Program dan Kegiatan

Tabel 1. KRO-RO BBPSI SDLP TA.2024

Program	Komponen/Sub Komponen	Volume
018.09.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		
	6916.ADA Standardisasi Produk	12 Standar
	6916.ADA.105 Rancangan Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian	8
	6916.ADA.113 Konsep Rancangan Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian	4
	6916.BJA Penyidikan dan Pengujian Produk	4 Produk
	6916.BJA.105 Instrumen Tanah, Air, Tanaman, Pembenh Tanah dan Pupuk yang diuji	4
018.09.WA Program Dukungan Manajemen		
	6918.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	3 Layanan
	6918.EBA.956 Layanan BMN	1
	6918.EBA.962 Layanan Umum	1
	6918.EBA.994 Layanan Perkantoran	1

	6918.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	6 Unit
	6918.EBB.951 Layanan Sarana Internal	6
	6918.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	3 Layanan
	6918.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1
	6918.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1
	6918.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	1

2.2. Indikator Kinerja Utama

Kegiatan BBPSI SDLP diarahkan untuk mencapai sasaran dan Indikator Kinerja Utama, yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama BBPSI SDLP Tahun 2024

Program/Kegiatan/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja
Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian (BBPSI SDLP)		
1.	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian
2.	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Pelayanan Prima	2. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian
3.	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	3. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Komitmen BBPSI SDLP dalam upaya mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan setelah melalui berbagai pembahasan, dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK). Setelah ditetapkannya pagu definitif, selanjutnya PK tersebut diajukan kepada Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) untuk ditetapkan menjadi dokumen Perjanjian Kinerja yang sah. Berikut ini disajikan Perjanjian Kinerja yang diajukan untuk ditandatangani oleh Kepala BSIP.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja BBPSI SDLP Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	8 Standar

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
2.	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian	81 (Nilai)
3.	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian	94,44 (Nilai)
Pagu Anggaran		15.754.506.000,-	

Berdasarkan lampiran Perjanjian Kinerja, pada tahun 2024 BBPSI SDLP berjanji merealisasikan: (1) 8 jumlah rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan; (2) 81 Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian; dan (3) 94,44 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian.

III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini diuraikan mengenai hasil kegiatan yang dicapai oleh Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian (BBPSI SDLP) yang merupakan bagian dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP). Data capaian kegiatan yang digunakan bersumber dari seluruh satker lingkup BBPSI SDLP.

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan tidak terlepas dari telah diterapkannya monitoring dan evaluasi serta Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkup BBPSI SDLP. Mekanisme monitoring dan evaluasi kegiatan standardisasi dan kegiatan pendukung lainnya dilakukan setiap minggu, setiap bulan, dan setiap triwulanan melalui aplikasi yang disediakan oleh DJA (SMART), DJP (OM-SPAN), Bappenas (*e-monev* Bappenas), Biro Perencanaan Kementan (e-SAKIP), dan BSIP (e-Monitoring).

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran capaian kinerja BBPSI SDLP Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja dengan capaiannya. Namun pengukuran keberhasilan kinerja suatu instansi pemerintah memerlukan indikator kinerja sebagai tolok ukur pengukuran. Indikator kinerja tersebut merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum indikator kinerja memiliki fungsi yaitu: (1) dapat memperjelas tentang apa, berapa, dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, dan (2) membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja unit kerja.

Sesuatu yang dapat dijadikan indikator kinerja yang berlaku untuk semua kelompok kinerja harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, (3) harus relevan, (4) dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, (5) harus fleksibel dan sensitif, serta (6) efektif dan data/informasi yang berkaitan dengan indikator dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis.

Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan tahun 2024 dilakukan dengan menggunakan kriteria penilaian yang terbagi ke dalam 4 (empat) kategori berdasarkan skoring, yaitu (1) sangat berhasil: > 100 persen; (2) berhasil: 80 - 100 persen; (3) cukup berhasil: 60 - 79 persen; dan (4) tidak berhasil: 0 - 59 persen.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja (PK), BBPSI SDLP mempunyai 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan 3 indikator kinerja utama (IKU) dengan target dan capaian untuk tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4. Capaian Kinerja Indikator Sasaran BBPSI SDLP Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	Standar	8	9	112,5
2.	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian	Nilai	81	85,21	105,20
3.	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian	Nilai	94,44	95,62	101,25
Rata-Rata Capaian Kinerja						106,31
Pagu Anggaran			Rp.	15.754.506.000,-		
Realisasi Anggaran			Rp.	14.030.951.358,-	89,06	

Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana pada tabel diatas, capaian indikator kinerja BBPSI SDLP pada tahun 2024 mencapai rata-rata 106,31%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan pencapaian kinerjanya adalah **Sangat Berhasil**. Sedangkan dalam pemanfaatan anggaran, BBPSI SDLP mampu menyerap anggaran sebesar 89,06% dari total pagu yang dialokasikan.

3.2. Analisis Capaian Kinerja

3.2.1. Capaian Kinerja Tahun Berjalan

Sasaran Kegiatan 1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian
INDIKATOR KINERJA 1	
Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	

Berdasarkan target di Tahun 2024, BBPSI SDLP menargetkan sebanyak 8 RSNi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Target RSNi ini dicapai dengan output dokumen RSNi3. Hingga akhir tahun 2024 diperoleh dokumen RSNi3 yang

telah melalui tahap rapat konsensus sebanyak 9 RSNI (112,5%). Berdasarkan data tersebut, target menyelesaikan 8 RSNI sudah terpenuhi bahkan melebihi target.

Indikator kinerja ini dapat melebihi target karena jumlah rancangan standar yang diusulkan sebanyak 10 judul RSNI, tetapi terdapat 1 judul RSNI yang di drop dikarenakan ketidakmampuan dalam mengumpulkan SDM yang kompeten pada bidang kaji rumusan standar tersebut. Rincian dokumen RSNI3 yang telah dihasilkan tersaji pada Tabel 5.

Tabel 5. Rincian Dokumen RSNI3 yang dihasilkan BBPSI SDLP Tahun 2024
Standar Bidang Sumber Daya Lahan Pertanian

No	Judul RSNI3	Komite Teknis Perumus	Status Konsensus	Status Jajak Pendapat RSNI3	Status Penetapan SNI	UK/UPT Konseptor
1	RSNI3 8473:2024, Survei dan Pemetaan Tanah Detail Skala 1:50.000	07-01 Informasi Geografi/Geomatika - BIG	Konsensus pada 20 Agustus 2024	Masa JP: 11 Oktober 2024 – 09 November 2024	Penetapan SNI pada Tahun 2024	BBPSI SDLP
2	RSNI3 7925:2024, Pemetaan Lahan Gambut Skala 1:50.000	07-01 Informasi Geografi/Geomatika - BIG	Konsensus pada 06 September 2024	Masa JP: 14 Oktober 2024 – 12 November 2024	Penetapan SNI pada tahun 2024	BBPSI SDLP
3	RSNI3 9302:2024, Spesifikasi Informasi Geospasial – Klasifikasi Sumberdaya Agroklimat untuk Pola Tanam Tanaman Pangan Skala 1:250.000	07-01 Informasi Geografi/Geomatika - BIG	Konsensus pada 19 September 2024	Masa JP: 15 Oktober 2024 – 13 November 2024	Penetapan SNI pada tahun 2024	BPSI Agroklimat dan Hidrologi Pertanian
4	RSNI3 Adopsi ISO 25177:2019, Kualitas Tanah – Deskripsi Tanah di Lapang	65-23 Sumberdaya Lahan Pertanian - Kementan	Konsensus pada 28 Agustus 2024	Masa JP: 19 September 2024 – 03 Oktober 2024	Penetapan SNI pada tahun 2024	BBPSI SDLP

5	RSNI3 Adopsi ISO 23646:2022, Kualitas Tanah – Metode Pengujian Pestisida Organoklorin menggunakan GC MS dan GC ECD	65-23 Sumberdaya Lahan Pertanian - Kementan	Konsensus pada 28 Agustus 2024	Masa JP: 19 September 2024 – 03 Oktober 2024	Penetapan SNI pada tahun 2024	BPSI Lingkungan Pertanian
6	RSNI3 9292:2024, Metode Perhitungan Kebutuhan Air Tanaman serta Interval dan Volume Irigasi di Lahan Kering	65-23 Sumberdaya Lahan Pertanian - Kementan	Konsensus pada 27 september 2024	Masa JP: 08 Oktober 2024 – 06 November 2024	Penetapan SNI pada tahun 2024	BPSI Agroklimat dan Hidrologi Pertanian
7	RSNI3 9281:2024, Standar Sistem Tata Air Mikro di Lahan Rawa Pasang Surut Tipe Luapan B	65-23 Sumberdaya Lahan Pertanian - Kementan	Konsensus pada 12 september 2024	Masa JP: 03 Oktober 2024 – 01 November 2024	Penetapan SNI pada tahun 2024	BPSI Pertanian Lahan Rawa
8	RSNI3 9282:2024, Pengelolaan Hama Terpadu Ulat Grayak (Spodoptera frugiperda J.E. Smith) pada Tanaman Jagung	65-24 Pertanian Berkelanjutan - Kementan	Konsensus pada 20 September 2024	Masa JP: 03 Oktober 2024 – 01 November 2024	Penetapan SNI pada tahun 2024	BPSI Lingkungan Pertanian
9	RSNI3 7763:2024, SNI Pupuk Organik Padat	65-06 Produk Agro Kimia - Kemenperin	Konsensus pada 13 Mei 2024	Masa JP: 10 Juni 2024 – 10 Juli 2024	Penetapan SNI pada tahun 2024	BPSI Tanah dan Pupuk

Tabel 6. Perbandingan Capaian IKU 1 Tahun 2023-2024

Indikator Kinerja		Tahun	
		2023	2024
Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	Target	2	8
	Realisasi	3	9
	Capaian (%)	150	112,5

Kegiatan rancangan standar instrumen sumber daya lahan pertanian pada Tahun 2024 terselesaikan pada Triwulan IV di Bulan Oktober 2024 untuk judul PNPS Biasa. Secara kinerja berdasarkan target waktu perumusan RSNI, RSNI3 sudah sesuai target bahkan lebih cepat dari tenggat waktu perumusan dengan selesai sebelum bulan Januari 2024 (13 Bulan untuk PNPS Biasa).

Secara substansi perumusan dalam rapat teknis dan rapat konsensus, konseptor serta anggota Komtek menunjukkan kinerja yang cukup baik tetapi dengan terlambatnya dukungan anggaran (adanya blokir anggaran di awal tahun) untuk kegiatan ini sehingga waktu perumusan dan diskusi penyusunan draft sangat terbatas untuk menyesuaikan dengan tenggat waktu. Selain itu tidak adanya garis koordinasi penganggaran yang jelas untuk penyusunan judul RSNI baik secara internal maupun eksternal (dengan komite teknis di luar Kementerian Pertanian) mengakibatkan beban anggaran yang cukup besar di BBPSI SDLP sehingga perlu adanya perencanaan efisiensi anggaran pada Triwulan III dan Triwulan IV untuk kegiatan ini. Sehingga dalam kesimpulannya BBPSI SDLP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi standardisasi setelah adanya peralihan tugas dan fungsi Litbangjirap mampu untuk beradaptasi dan berkinerja dengan sangat baik. Terbukti dengan melebihi realisasi dari target dan tepat waktu dalam menghasilkan dokumen RSNI3. Penguatan perencanaan perumusan RSNI dari segi penganggaran dan substansial perlu diperhatikan untuk menunjang kinerja standardisasi.

Sasaran Kegiatan 2	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
INDIKATOR KINERJA 2 Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian	

Dalam rangka mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, dibutuhkan peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas (ZI) pada unit kerja Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian. Dalam upaya peningkatan birokrasi sebagai pelaksanaan tugas pemerintahan, BBPSI SDLP terus melakukan perubahan dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 penilaian ZI BBPSI SDLP dilakukan secara mandiri oleh Tim Asesor Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dengan metode uji silang antar unit kerja atau eselon II. Poin-poin penilaian Pembangunan ZI terdiri dari: 1) manajemen perubahan, 2) penataan tata laksana, 3) penataan sistem manajemen SDM, 4) penguatan akuntabilitas kinerja, 5) penguatan pengawasan, dan 6) peningkatan kualitas layanan publik.

Berdasarkan hasil penilaian ZI tersebut, BBPSI SDLP memperoleh nilai sebesar 85,21 dengan nilai target IKU 3 sebesar 81, telah terpenuhi.

Tabel 7. Hasil Penilaian ZI BBPSI SDLP

Penilaian			Bobot	Nilai
A. PENGUNGKIT				
I. PEMENUHAN				
	1	Manajemen Perubahan	4,00	3,52
	2	Penataan Tata Laksana	3,50	3,14
	3	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	5,00	4,58
	4	Penguatan Akuntabilitas	5,00	4,74
	5	Penguatan Pengawasan	7,50	7,03
	6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,00	4,64
II. REFORM				
	1	Manajemen Perubahan	4,00	2,00
	2	Penataan Tata Laksana	3,50	2,67
	3	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	5,00	5,00
	4	Penguatan Akuntabilitas	5,00	4,00
	5	Penguatan Pengawasan	7,50	7,50
	6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,00	3,13
TOTAL PENGUNGKIT			60,00	51,95
B. HASIL				
I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL				
	a.	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal: Indeks Persepsi Anti Korupsi/IPAK)	17,50	15,75
	b.	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,00	2,50
II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA				
	a.	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal: Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik/IPKP)	17,50	15,01
TOTAL HASIL			40,00	33,26
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI			85,21	

Tabel 8. Perbandingan Capaian IKU 2 Tahun 2023-2024

Indikator Kinerja		Tahun	
		2023	2024
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian	Target	80,5	81
	Realisasi	83,47	85,21
	Capaian (%)	103,05	105,20

Dibandingkan dengan tahun 2023, nilai Zona Integritas BBPSI SDLP tahun 2024 meningkat menjadi 85,21 poin dari sebelumnya sebesar 83,47 poin. Kenaikan nilai Pembangunan ZI ini disebabkan oleh pemenuhan kriteria penilaian poin pemenuhan, reform, birokrasi bersih dan akuntabel. Pemenuhan kriteria

penilaian Zona Integritas BBPSI SDLP merupakan hasil dari perbaikan kinerja manajemen yang terus berlangsung di BBPSI SDLP, menandakan bahwa kinerja akuntabilitas instansi pemerintah yang dilakukan oleh BBPSI SDLP semakin baik. Bentuk perbaikan yang dilakukan diantaranya penyelenggaraan aktivitas kegiatan manajemen yang sistematis dan manajemen dokumentasi kegiatan yang baik terbukti dapat meningkatkan kinerja BBPSI SDLP dalam menciptakan lingkungan instansi pemerintah yang akuntabel dan prima.

Sasaran Kegiatan 3	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas
INDIKATOR KINERJA 3	
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian	

Dalam rangka penyesuaian indikator reformasi birokrasi (RB) maka adanya perubahan indikator kinerja dari yang sebelumnya menggunakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) menjadi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga mulai tahun 2022, nilai IKPA diukur dari 3 (tiga) aspek/sisi yaitu, Kualitas Perencanaan Anggaran (20%), Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%), dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%). Dasar hukum penggunaan IKPA di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Tujuan dari penggunaan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan (LKK/LKPP).

Pada akhir Desember 2024, BBPSI SDLP mendapat nilai IKPA sebesar 95,62 yang merupakan nilai dari : (1) Kualitas Perencanaan Anggaran sebesar 91,60; (2) Kualitas Pelaksanaan Anggaran sebesar 96,68; dan (3) Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran sebesar 100,00. Nilai tersebut sudah melebihi dari target IKU 3 yaitu sebesar 94,44.

Tabel 9. Perbandingan Capaian IKU 3 Tahun 2023-2024

Indikator Kinerja	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian (berdasarkan regulasi yang berlaku)	87	88,3	101,50			

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian	-	-	-	94,44	95,62	101,25
---	---	---	---	-------	-------	--------

3.2.2. Pengukuran Capaian Kinerja dengan Target Renstra 2023-2024

Rencana strategis (Renstra) merupakan suatu dokumen penting yang memuat aktivitas perencanaan untuk beberapa tahun kedepan. Dokumen Renstra BBPSI SDLP 2023-2024 berisi rencana kegiatan-kegiatan utama perumusan dan pengujian instrumen standar pertanian yang akan dilakukan oleh BBPSI SDLP dengan mempertimbangkan berbagai keunggulan, peluang, kendala, serta tantangan yang akan dihadapi selama 2 tahun kedepan. Renstra selanjutnya diturunkan dalam bentuk rencana kegiatan yang lebih detail dalam kegiatan manajemen dan teknis. Pada renstra 2023-2024, terdapat perubahan indikator kinerja pada tahun 2023 dengan tahun 2024, dimana pada tahun 2023 menggunakan Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran (NKA) kemudian pada tahun 2024 menggunakan Indikator Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Perbandingan capaian kinerja dengan target Renstra 2023-2024 disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra 2023-2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Keterangan	Tahun	
				2023	2024
Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	Standar	Target	2	8
			Realisasi	3	9
			%	150	112,5
Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian	Nilai	Target	81	81
			Realisasi	83,47	85,21
			%	103,05	105,20
Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian (berdasarkan regulasi yang berlaku) (Tahun 2023)	Nilai	Target	87	
			Realisasi	88,83	
			%	101,50	
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	Target		94,44
			Realisasi		95,62

	(IKPA) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian (Tahun 2024)		%		101,25
--	---	--	---	--	--------

3.2.3. Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan, tidak terlepas dari perencanaan yang matang dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh setiap tim baik pada kegiatan teknis maupun manajemen. Komunikasi yang terbangun secara baik akan menciptakan kerjasama tim yang solid dalam melaksanakan kegiatan. Serta dengan dukungan dana, personil dan sarana prasarana yang memadai sehingga pelaksanaan terkait pencapaian target kinerja dapat dicapai.

3.2.4. Kendala dan Langkah Antisipasi

Tabel 11. Kendala dan Langkah Antisipasi

No	Sasaran	Kendala		Langkah Antisipasi	
		Fisik	Non Fisik	Fisik	Non Fisik
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Sulit untuk melakukan koordinasi dengan konseptor		Koordinasi informal terlebih dahulu sebelum melakukan pertemuan koordinasi secara formal	
			Terdapat blokir anggaran pada konsep rancangan dan rancangan standar		Perlu melakukan penyusunan rencana strategis (substansi dan penganggaran) untuk rancangan standar
2	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima		Terdapat beberapa dokumen yang belum terdokumentasi dengan baik		Melakukan koordinasi rutin antara kelompok/bagian substansi
3	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang		Realisasi anggaran yang terhambat akibat adanya blokir anggaran pada beberapa kegiatan		Merevisi PK sesuai anggaran yang dapat digunakan dan output yang dapat dicapai

No	Sasaran	Kendala		Langkah Antisipasi	
		Fisik	Non Fisik	Fisik	Non Fisik
	Akuntabel dan Berkualitas		Penghapusan pagu penggunaan PNPB yang terblokir menyebabkan sub kegiatan operasional laboratorium terhambat.		dengan anggaran yang tersedia

3.2.5. Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Berdasarkan perhitungan efisiensi yang tercantum di dalam PMK 214/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, maka BBPSI SDLP dapat dikategorikan berhasil dalam menjalankan efisiensi anggaran. Efisiensi mempunyai skala -20% sampai dengan 20%, sehingga perlu ditransformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang disebut dengan nilai efisiensi yang berkisar antara 0 sampai dengan 100%. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya (PMK 214/2017, pasal 8 ayat 9).

Transformasi skala efisiensi menjadi kisaran antara 0 sampai dengan 100% digunakan rumus dibawah ini:

$$NE = 50 \% + \left[\frac{E}{20} \times 50 \right]$$

Keterangan:

NE = Nilai Efisiensi

E = Efisiensi

Untuk mencapai sasarnya, BBPSI SDLP menggunakan rumus tersebut dan dihasilkan Efisiensi sebesar **12,70%** atau jika ditransformasi sama dengan Nilai Efisiensi (NE) sebesar **32,25%** pada Indikator Kinerja **Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan**; Efisiensi sebesar **5,23%** atau jika ditransformasi sama dengan Nilai Efisiensi (NE) sebesar **13,575%** pada Indikator Kinerja **Nilai Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian**; dan Efisiensi sebesar **11,13%** atau jika ditransformasi sama dengan Nilai Efisiensi (NE) sebesar **28,325%** pada Indikator Kinerja **Nilai Kinerja Anggaran (IKPA) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian**. Rincian perhitungan Nilai Efisiensi Indikator Kinerja disajikan pada Lampiran 9. Kemudian untuk Nilai Efisiensi atas penggunaan sumberdaya BBPSI SDLP sebagaimana yang ditunjukkan pada sistem monitoring dan evaluasi kinerja yaitu pada aplikasi SMART disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Nilai Efisiensi atas Penggunaan Sumberdaya BBPSI SDLP Tahun 2024

Program	RO	Uraian SBK	Indeks SBK	Realisasi	TVRO	RVRO	Indeks Realisasi Anggaran	Selisih	Tingkat Efisiensi Per RO (%)	Nilai Efisiensi Per RO (%)
EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	6916.ADA.105 Rancangan Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian (standar)	RSNI3 dengan Metode Pengembangan Sendiri (standar)	472.000.000	1.668.982.674	8,00	8,00	208.622.834	263.377.166	56	20
	6916.ADA.113 Konsep Rancangan Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian (standar)	RSNI3 dengan Metode Pengembangan Sendiri (standar)	472.000.000	194.960.570	4,00	4,00	48.740.142	423.259.858	90	20

3.3. Capaian Kinerja Lainnya

3.3.1. Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015

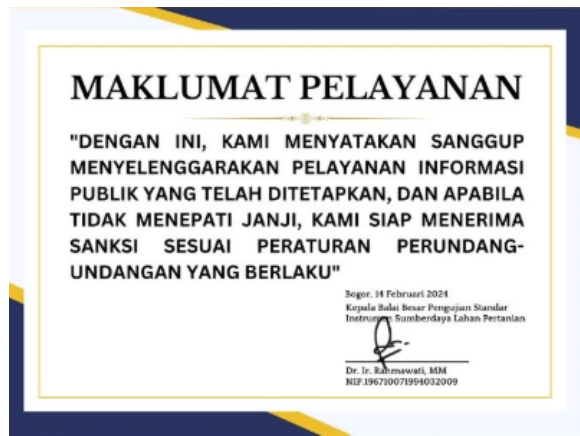
Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu (SMM) SNI ISO 9001:2015 merupakan Upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa organisasi tetap memenuhi persyaratan standar internasional terkait kualitas. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pelanggan, meminimalkan risiko, dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pemeliharaan SMM SNI ISO 9001:2015 di organisasi selama periode tertentu. Cakupan kinerja Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 meliputi berikut:



Gambar 2. Pelaksanaan Audit Internal Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015

3.3.2. Keterbukaan Informasi Publik

Balai Besar Pengujian Standardisasi Sumberdaya Lahan Pertanian (BSIP SDLP) melaksanakan penandatanganan Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagai bentuk kesiapan dalam melayani masyarakat. Komitmen tersebut ditandatangani langsung oleh Kepala BSIP SDLP, jajaran struktural, perwakilan jabatan fungsional dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BSIP SDLP. Penandatanganan Komitmen KIP diselenggarakan setiap tahun dan merupakan suatu kewajiban pemerintah untuk memberikan akses mudah bagi masyarakat, sehingga sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dan berpartisipasi dalam pengambilan suatu kebijakan yang tepat. Selain itu, Kepala BBPSI SDLP juga menandatangani maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan tertulis berisi rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan. Maklumat ini harus dipatuhi oleh seluruh pegawai BBPSI SDLP.



Gambar 3. Maklumat Pelayanan BBPSI SDLP



Gambar 4. Penandatanganan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik

Pada penilaian keterbukaan informasi publik tahun 2024, BBPSI SDLP dianugerahi penghargaan sebagai salah satu unit kerja dengan predikat informatif, yang merupakan kategori tertinggi dalam keterbukaan informasi publik. Keberhasilan ini juga diraih oleh UPT di bawah naungan BBPSI SDLP, seperti BPSI Tanah dan Pupuk, BPSI Pertanian Lahan Rawa, BPSI Agroklimat dan Hidrologi Pertanian serta BPSI Lingkungan Pertanian. Tujuan dari penghargaan ini adalah memberikan apresiasi kepada PPID yang berhasil menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik secara optimal. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong komitmen seluruh unit kerja untuk memberikan layanan informasi yang transparan, cepat dan akuntabel kepada masyarakat.



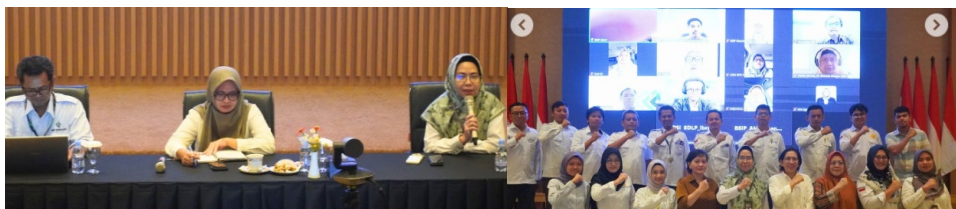
Gambar 5. Penerimaan Penghargaan sebagai Unit Kerja dengan Predikat Informatif

3.3.3. LS Pro BBPSI SDLP

Pada tahun 2024, LS Pro BBPSI SDLP telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka penguatan layanan dan sistem kerja LS Pro, diantaranya adalah:

1. Sosialisasi LS Pro BBPSI SDLP

Pada tahun 2024, LS Pro BBPSI SDLP dalam proses mendaftarkan lembaganya ke KAN (Komite Akreditasi Nasional). LS Pro BBPSI SDLP telah mengunggah berbagai dokumen kelengkapan yang diperlukan sedang mengikuti proses-proses berikutnya. Dalam rangka mendukung terwujudnya peningkatan kualitas hasil pertanian, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) melalui Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian (BBPSI SDLP) membentuk Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro) yang menjalankan fungsi penilaian kesesuaian sertifikasi produk pupuk dan pestisida. Untuk optimalisasi proses kinerja LS Pro tersebut, BBPSI SDLP menyelenggarakan sosialisasi secara hybrid kepada para stakeholder dan petugas terkait.



Gambar 6. Sosialisasi LS Pro BBPSI SDLP

LS Pro Pupuk dan Pestisida BBPSI SDLP mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi dan menerbitkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI). Laboratorium yang ditunjuk sebagai penguji adalah Lab milik BPSI Tanah dan Pupuk dan BPSI Lingkungan Pertanian. Selain laboratorium,

komponen lain yang disosialisasikan pada acara tersebut adalah dewan pengarah, komisi teknis, komite banding, komite ketidakberpihakan, auditor, dan petugas pengambil contoh. Pertemuan dilanjutkan dengan kajian dan tinjauan hasil evaluasi LSPro BBPSI SDLP. Terbentuknya LS Pro BBPSI SDLP diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produk dan hasil pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan Indonesia.

2. Pelatihan Lead Auditor LS Pro BBPSI SDLP

Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian (BBPSI SDLP) menggelar Pelatihan Lead Auditor pada tanggal 23-27 September 2024. Bekerjasama dengan Mutu Institute sebagai mitra narasumber, kegiatan tersebut diikuti oleh 15 orang peserta yang juga berasal dari BSIP Tanah dan Pupuk. Pelatihan ini merupakan upaya LSPro BBPSI SDLP untuk meningkatkan kompetensi auditor dalam melakukan pelayanan penilaian kesesuaian. LSPro BBPSI SDLP sendiri merupakan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dalam lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang menyediakan jasa sertifikasi produk pupuk dan pestisida sesuai dengan ruang lingkup SNI.



Gambar 7. Pelatihan Lead Auditor LS Pro BBPSI SDLP

Pada kesempatan tersebut, materi yang diberikan berkaitan dengan prinsip penyelenggaraan dan manajemen LSPro yang berintegritas, ditunjukkan dengan ketidakberpihakan manajemen puncak, berorientasi kompetensi melalui peningkatan kapasitas secara periodik, dan konsistensi melalui pengelolaan dokumentasi serta manajemen LSPro. Selain penyelenggaraan LSPro, materi ISO 19011:2018 untuk Audit Sistem Manajemen juga disampaikan untuk memastikan proses audit dan pemeriksaan dilakukan secara profesional dan independen.

3. Benchmarking ke BBSPJI Tekstil Bandung

Perwakilan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) BBPSI SDLP melakukan studi banding ke Balai Besar Standardisasi dan Pengujian Jasa Industri Tekstil (BBSPJIT), Kementerian Perindustrian di Bandung. Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari pengelolaan dan manajemen organisasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang diterapkan di BBSPJI Tekstil. Dalam melayani kebutuhan stakeholder, BBSPJI Tekstil menyediakan layanan LPK yang meliputi pengujian, kalibrasi, inspeksi, sertifikasi, dan jasa teknis lainnya seperti bimbingan, konsultasi, pendampingan, serta audit industri.



Gambar 8. BBPSI SDLP Benchmarking ke BBSPJI Tekstil Bandung

Kegiatan diisi dengan diskusi mengenai tugas dan fungsi masing-masing unit kerja serta manajemen pengelolaan organisasi di BBSPJI Tekstil. Pada kesempatan tersebut dijelaskan bahwa BBSPJI Tekstil memiliki LSPro TEXPA BBPSJI Tekstil (LSPr-023-IDN). LSPro ini melakukan pelayanan sertifikasi produk terhadap dua lingkup SNI Wajib dan berbagai produk lingkup SNI sukarela untuk puluhan jenis produk tekstil. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan tur kawasan BBSPJI Tekstil, seperti mengunjungi gedung Industrial Services & Solution Center sebagai pusat pelayanan pelanggan satu pintu di BBSPJI Tekstil.

4. Pelatihan Manajemen Risiko

Dalam upaya meningkatkan kompetensi dan kualitas kinerja Lembaga Sertifikasi Produknya (LS Pro), Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian (BBPSI SDLP) menyelenggarakan Pelatihan Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000. Pelatihan ini berlangsung pada 20–22 November 2024 dengan diikuti oleh 15 peserta, termasuk perwakilan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BSIP SDLP, yakni BSIP Tanah dan Pupuk serta BSIP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian. Pelatihan tersebut dirancang untuk memperkuat kemampuan peserta dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko secara sistematis dan terstruktur. Hal ini penting untuk melindungi nilai organisasi dan meningkatkan efektivitas kerjanya.



Gambar 9. Pelatihan Manajemen Risiko LS Pro BBPSI SDLP

Materi pelatihan mencakup pemahaman mendasar tentang risiko, prinsip, kerangka kerja, dan proses manajemen risiko. Peserta juga diperkenalkan pada elemen-elemen kunci seperti integrasi, struktur, penyesuaian, faktor manusia dan budaya, serta pentingnya pengelolaan yang dinamis, inklusif, dan berbasis informasi terbaik. Selain itu, pendekatan ini harus didukung oleh perbaikan berkelanjutan untuk menjaga relevansi dan efektivitasnya.

3.3.4. SISCrop

Sistem Informasi Standing Crop (SISCrop) 2.0 terus dimanfaatkan. Pada tanggal 20 Februari 2024, Dalam rangka mendukung program Satu Data Pangan Nasional, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) melalui Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian (BSIP SDLP) bersama Kementerian PPN/Bappenas membahas lebih lanjut terkait SISCrop 2.0. Bertempat di Kantor BSIP SDLP, pada kesempatan ini dibahas mengenai pemanfaatan SISCrop lebih jauh dan perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan serta pembangunan nasional.



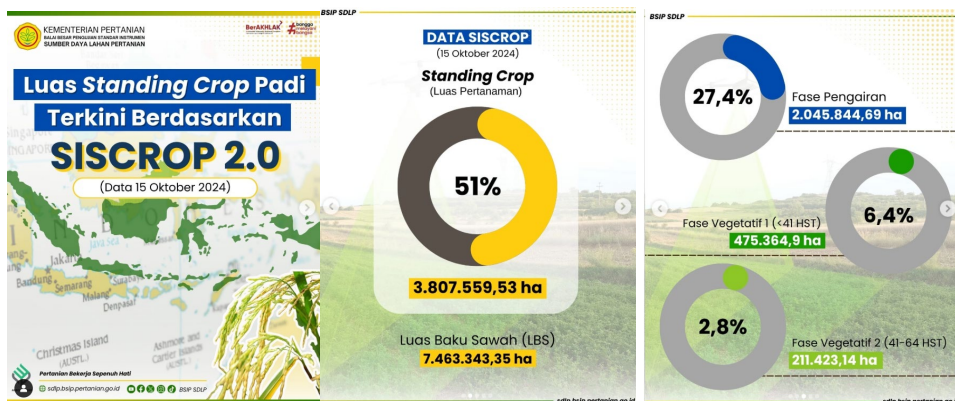
Gambar 10. Pemanfaatan SISCrop dengan Bappenas

Pada tanggal 26 Maret 2023, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) melalui BBPSI SDLP berkesempatan untuk menjadi narasumber pada Workshop Pemanfaatan dan Pengembangan SISCrop. Bertempat di Luminor Hotel Padjadjaran Bogor, kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional). Lebih lanjut, poin yang dibahas pada workshop ini diantaranya adalah prediksi luas tanam, indeks pertanaman, prediksi produktivitas, dan indikasi alih fungsi lahan. Workshop tersebut merupakan tindak lanjut dari FGD SIMURP (Loan Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project) yang dilaksanakan tanggal 15 November lalu.



Gambar 11. BBPSI SDLP menjadi narasumber terkait pengembangan SISCrop

SISCrop merupakan sistem informasi yang diupdate setiap 15 hari sekali. Sebagai bentuk diseminasi informasi, data 15 harian ini juga dibagikan di media sosial BBPSI SDLP, seperti Facebook, Instagram dan X.



Gambar 12. Data 15 harian SISCrop dibagikan di media sosial BBPSI SDLP

3.3.5. Penghargaan Komite Teknis 65-23 Sumber Daya Lahan Pertanian

Balai Besar Pengujian Sumber Daya Lahan Pertanian dalam hal ini sebagai Sekretariat Komite Teknis 65-23 Sumber Daya Lahan Pertanian, mendapatkan piagam penghargaan atas keikutsertaannya dalam Seleksi Herudi Technical Committee Award Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Piagam Penghargaan No. 166/STF/DKS/2024 dengan predikat penilaian "Sangat Baik" diberikan pada Komite Teknis 65-23 Sumber Daya Lahan Pertanian dalam acara penganugerahan HTCA oleh BSN pada tanggal 21 November 2024.

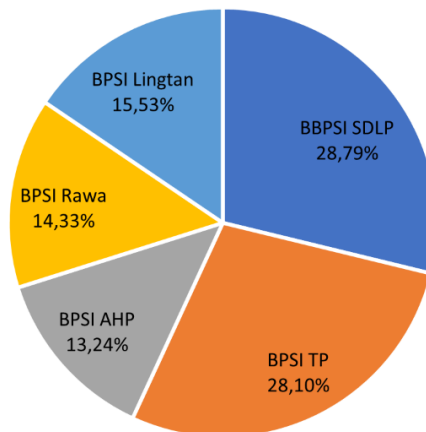


Gambar 13. Piagam Penghargaan atas Keikutsertaan dalam Seleksi *Herudi Technical Committee Award* Tahun 2024

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Pencapaian kinerja akuntabilitas bidang keuangan lingkup BBPSI SDLP pada umumnya cukup berhasil dalam mencapai sasaran dengan baik. Untuk membiayai operasional seluruh kegiatan lingkup BBPSI SDLP pada tahun 2024 berdasarkan total pagu terakhir mendapat anggaran sebesar Rp 54.717.923.000,- dengan rincian per satker: BBPSI SDLP sebesar Rp 15.754.506.000,-; BPSI Tanah dan Pupuk sebesar Rp 15.376.677.000,-; BPSI Agroklimat dan Hidrologi Pertanian sebesar Rp 7.245.158.000,-; BPSI Pertanian Lahan Rawa sebesar Rp 7.843.515.000,-; dan BPSI Lingkungan Pertanian sebesar Rp 8.498.067.000,-. Dari anggaran tersebut sebesar Rp 48.405.500.000,- berasal dari anggaran APBN, Rp 1.750.440.000,- berasal dari PNPB dan sisanya Rp 4.561.983.000,- dari dana Hibah, dengan rincian sebagai berikut: Rp 1.072.611.000,- dikelola oleh BBPSI SDLP, Rp 260.079.000,- dikelola oleh BPSI Lingkungan Pertanian, dan Rp 3.229.293.000,- dikelola oleh BPSI Tanah dan Pupuk. Keseluruhan anggaran (APBN, PNPB, dan Hibah) digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilaksanakan oleh BBPSI SDLP, BPSI Tanah dan Pupuk, BPSI Agroklimat dan Hidrologi Pertanian, BPSI Pertanian Lahan Rawa, dan BPSI Lingkungan Pertanian, seperti kegiatan Kerjasama, perencanaan dan pemantauan program, maupun kegiatan layanan pendukung/administrasi.

Besaran proporsi anggaran tiap satker dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

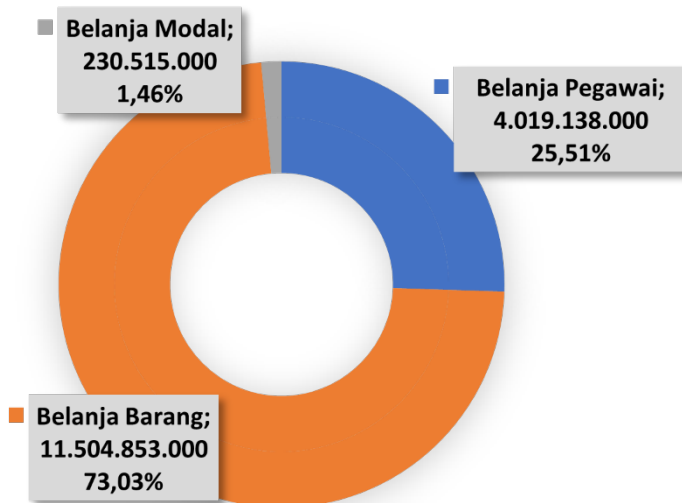


Gambar 14. Proporsi Anggaran APBN Per Satker Lingkup BBPSI SDLP 2024
(Sumber data: OMSPAN)

Berdasarkan komposisi pagu anggaran di atas memperlihatkan BBPSI SDLP menempati pagu anggaran tertinggi, yaitu sebesar 28,79%, sedangkan pagu anggaran terendah adalah satker BPSI Agroklimat dan Hidrologi Pertanian yakni sebesar 13,24%. Hal ini disebabkan BPSI Agroklimat dan Hidrologi Pertanian

memiliki jumlah pegawai yang paling rendah dibandingkan satker lainnya di lingkup BBPSI SDLP.

Belanja dalam rangka operasional kegiatan lingkup BBPSI SDLP dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya seluruh kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja. Pagu BBPSI SDLP dialokasikan untuk belanja pegawai, barang, dan modal, dimana persentase masing-masing belanja dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 15. Perbandingan Proporsi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Berdasarkan gambar diatas, menunjukkan bahwa proporsi Belanja Barang menempati posisi terbesar yakni sejumlah Rp 11.504.853.000,- atau 73,03%, selanjutnya secara berturut-turut adalah Belanja Pegawai menempati posisi kedua sebesar Rp 4.019.138.000,- atau 25,51%, dan Belanja Modal menempati posisi terkecil sebesar Rp 230.515.000,- atau 1,46% dari total pagu anggaran.

3.4.1. Realisasi Anggaran

Hingga akhir Desember 2024, total realisasi anggaran yang berhasil diserap lingkup BBPSI SDLP sebesar Rp 50.970.787.989,- atau 93,15% dari total pagu anggaran lingkup sebesar Rp 54.717.923.000,- dengan rincian: BBPSI SDLP Rp 14.030.951.358,- atau 89,06%; BPSI Tanah dan Pupuk Rp 14.818.842.182,- atau 96,37%; BPSI Agroklimat dan Hidrologi Pertanian Rp 6.691.195.274,- atau 92,35%; BPSI Pertanian Lahan Rawa Rp 7.312.330.113,- atau 93,23%; dan BPSI Lingkungan Pertanian Rp 8.117.469.062,- atau 95,52%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak terserap Rp 3.747.135.011,- atau 0,06%.

Tabel 13. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Lingkup BBPSI SDLP Tanggal 31 Desember 2024

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
BBPSI SDLP	15.754.506.000	14.030.951.358	89,06
Belanja Pegawai	4.019.138.000	3.938.943.167	98,00
Belanja Barang	11.504.853.000	9.861.558.191	85,72
Belanja Modal	230.515.000	230.450.000	99,97
BPSI TP	15.376.677.000	14.818.842.182	96,37
Belanja Pegawai	5.687.685.000	5.597.885.049	98,42
Belanja Barang	9.688.992.000	9.255.219.090	95,52
Belanja Modal	0	0	00,00
BPSI AHP	7.245.158.000	6.691.195.274	92,35
Belanja Pegawai	2.743.669.000	2.624.123.602	95,64
Belanja Barang	4.381.489.000	3.932.681.672	89,75
Belanja Modal	120.000.000	117.600.000	98,00
BPSI Rawa	7.843.515.000	7.312.330.113	93,23
Belanja Pegawai	3.410.976.000	3.234.044.980	94,81
Belanja Barang	4.432.539.000	4.078.285.133	92,01
Belanja Modal	0	0	00,00
BPSI Lingtan	8.498.067.000	8.117.469.062	95,52
Belanja Pegawai	3.769.819.000	3.727.351.381	98,87
Belanja Barang	4.634.959.000	4.298.867.681	92,75
Belanja Modal	93.289.000	91.250.000	97,81
Jumlah	54.717.923.000	50.970.787.989	93,15

Keseluruhan anggaran yang dignakan telah menghasilkan capaian fisik sebagai berikut: (1) 9 Rancangan standar instrumen sumberdaya lahan pertanian; (2) 2 Konsep rancangan standar instrumen sumberdaya lahan pertanian; (3) 1 Layanan BMN; (4) 1 Layanan Umum; (5) 1 Layanan perkantoran; (6) 1 Layanan perencanaan dan penganggaran; (7) 1 Layanan pemantauan dan evaluasi; serta (8) 1 Layanan manajemen keuangan.

3.4.2. PNPB

Sesuai mandat, BBPSI SDLP selain mendapat dana APBN dan hibah, juga menerima pendapatan dari PNPB yang berasal dari jenis penerimaan umum dan fungsional, antara lain 1) Pendapatan penjualan hasil produksi; 2) Pendapatan penjualan asset; 3) Pendapatan sewa; 4) Pendapatan jasa; dan 5) Pendapatan lain-lain.

Pada tahun 2024, realisasi Penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan 31 Desember 2024 antara lain Penerimaan Umum sebesar Rp 2.328.807.153,- (133,8%) dari target sejumlah Rp 1.740.488.000,- dan

Penerimaan Fungsional Rp 1.151.241.000,- (130,9%) dari target sejumlah Rp 879.064.000,-. Total Penerimaan PNBPN lingkup BBPSI SDLP sebesar Rp 3.480.048.153,- (132,8%) dari target total sejumlah Rp 2.619.552.000,-. Rincian target dan realisasi PNBPN di masing-masing satker lingkup BBPSI SDLP untuk tahun 2024 disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14. Target dan Realisasi PNBPN Lingkup BBPSI SDLP Tahun 2024

Satuan Kerja	Jenis Penerimaan	Jumlah Penerimaan		Capaian (%)
		Target	Realisasi	
BBPSI SDLP	Umum	8.250.000	35.296.103	427,8
	Fungsional	54.000.000	229.719.000	425,4
	Total	62.250.000	265.015.103	425,7
BPSI Tanah dan Pupuk	Umum	1.700.000.000	2.111.364.350	124,2
	Fungsional	0	0	0
	Total	1.700.000.000	2.111.364.350	124,2
BPSI Agroklimat dan Hidrologi	Umum	3.000.000	48.186.700	966,6
	Fungsional	23.000.000	29.000.000	197,2
	Total	26.000.000	77.186.700	297
BPSI Pertanian Lahan Rawa	Umum	21.060.000	105.946.000	503
	Fungsional	145.000.000	134.000.000	92,4
	Total	166.060.000	239.946.000	144,6
BPSI Lingkungan Pertanian	Umum	8.178.000	28.014.000	324,56
	Fungsional	657.064.000	758.522.000	116,00
	Total	665.242.000	786.536.000	118,2
Lingkup BBPSI SDLP	Umum	1.740.488.000	2.328.807.153	133,8
	Fungsional	879.064.000	1.151.241.000	130,9
	Total	2.619.552.000	3.480.048.153	132,8

PENUTUP

Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja BBPSI SDLP merupakan salah satu Upaya yang dilakukan BBPSI SDLP dalam rangka mendorong terwujudnya penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional yang diselaraskan dengan tugas dan fungsi BBPSI SDLP. Hasilnya dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja yang merupakan wujud pertanggungjawaban BBPSI SDLP kepada Masyarakat (publik).

Standar penilaian Laporan Kinerja tahun 2024 tidak hanya mengacu pada output (keluaran), tetapi berdasarkan outcome (dampak, manfaat jangka menengah dan panjang). Indikator Kinerja yang ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2024 terdiri dari 3 sasaran kegiatan dan 3 Indikator Kinerja, dengan target-target capaian berupa jumlah rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan, telah berhasil melampaui target dari 8 standar menghasilkan 9 standar. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian mencapai 85,21 nilai ZI melebihi nilai yang ditargetkan sebesar 81. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian sebesar 95,62, nilai tersebut melebihi dari yang ditargetkan yaitu sebesar 94,44 nilai IKPA.

Capaian berupa output maupun outcome akan lebih bernilai bila diukur dengan nilai realisasi anggaran dan efisiensinya. Persentase rata-rata capaian kinerja mencapai 105,7% (sangat berhasil), realisasi anggaran hingga 31 Desember 2024 adalah sebesar 89,06%. BBPSI SDLP menghasilkan angka Efisiensi sebesar 12,70% dengan Nilai Efisiensi (NE) sebesar 32,25% pada Indikator Kinerja 1 "Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan"; kemudian angka Efisiensi sebesar 5,23% dengan Nilai Efisiensi (NE) sebesar 13,575% pada Indikator Kinerja 2 "Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian"; dan angka Efisiensi sebesar 11,13% dengan Nilai Efisiensi (NE) sebesar 28,325% pada Indikator Kinerja 3 "Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian".

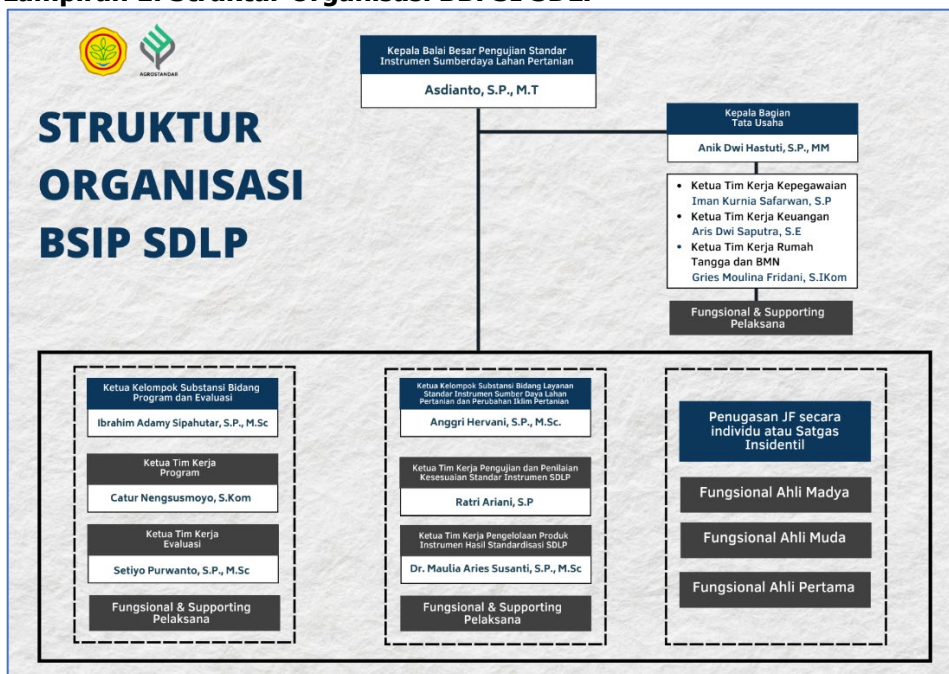
Kendala non teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan antara lain terbatasnya SDM berkualitas dan berkeahlian khusus, sarana dan prasarana yang kurang memadai, pemotongan anggaran, dan kendala spesifik tertentu, dengan komitmen bersama seluruh kendala tersebut bisa diatasi. Komitmen pimpinan yang tinggi untuk terus meningkatkan kualitas kinerja, dibuktikan dengan terusnya dilakukannya pembinaan etos kerja terhadap seluruh jajaran di lingkup BBPSI SDLP dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan, meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, mengoptimalkan sumberdaya yang ada, serta

memperbaiki fungsi manajemen. Guna meningkatkan kualitas output dari perumusan standar, perlu dilakukan kajian yang mendalam terhadap rencana kegiatan yang akan dilakukan terutama terkait output yang diharapkan agar sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pertanian terkini

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran berbasis outcome tersebut diatas menjadi bagian evaluasi yang sangat berharga bagi BBPSI SDLP untuk terus meningkatkan kinerja dan merubah *mindset* dari *output oriented* menjadi meningkatkan *outcome oriented* melalui upaya-upaya sebagai berikut: (1) Perencanaan yang matang dan sistematis setiap kegiatan yang dilakukan sesuai dengan target IKU, (2) Peningkatan efektivitas fungsi koordinasi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan tepat waktu, kualitas, dan sasaran pengguna hasil yang diharapkan, (3) Penetapan skala prioritas kegiatan yang mengacu pada prioritas nasional dan perencanaan kegiatan yang matang dengan mekanisme yang terkontrol dan tervalidasi melalui sinkronisasi pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan, (5) Pemberian "*reward dan punishment*" dilakukan secara proporsional kepada setiap penanggungjawab kegiatan berdasarkan penggunaan anggaran dan tingkat capaian kinerjanya, dan (6) Melakukan terobosan baru penyusunan program kerja/anggaran yang transparan, akuntabel, dan berbasis IT agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi BBPSI SDLP



Lampiran 2. Rekapitulasi Pegawai Lingkup BBPSI SDLP Berdasarkan Pendidikan Per Desember 2024

No	Unit Kerja	Pendidikan										Jumlah
		S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	
1	BBPSI SDLP	4	12	17		15			7			55
2	BPSI Pertanian Lahan Rawa	3	5	11		1			19			39
3	BPSI Tanah dan Pupuk	2	9	17		11			38	1	2	80
4	BPSI Agroklimat dan Hidrologi Pertanian		9	9		8			10			36
5	BPSI Lingkungan Pertanian	1	16	10	3	8			13		2	53
	Jumlah	10	51	64	3	43			87	1	4	263

Lampiran 3. Data Kepegawaian Sebaran SDM Lingkup BBPSI SDLP Berdasarkan Jenjang Fungsional Per Desember 2024

Jenjang Fungsional	BBPSI SDLP	BPSI Pertanian Lahan Rawa	BPSI Tanah dan Pupuk	BPSI AHP	BPSI Lingtan	Jumlah
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN	55	39	80	36	53	263
STRUKTURAL	2	2	1	2	2	9
PELAKSANA/JFU	20	19	43	17	23	122
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	33	18	36	17	28	132
ANALIS KEBIJAKAN	2					2
a. Analis Kebijakan Ahli Utama	2					2
b. Analis Kebijakan Ahli Madya						
c. Analis Kebijakan Ahli Muda						
d. Analis Kebijakan Ahli Pertama						
ANALIS SDM APARATUR	2					2
a. Analis SDM Aparatur Ahli Madya						
b. Analis SDM Aparatur Ahli Muda	1					1
c. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama						
d. Pranata SDM Aparatur Penyelia						
e. Pranata SDM Aparatur Mahir						
f. Pranata SDM Aparatur Terampil						
g. Calon Pranata SDM Aparatur Ahli Pertama	1					1
ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN	2		1			3
a. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya						
b. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1					1
c. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1		1			2
d. Calon Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama						
ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	3		5	4		11
a. Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Madya						
b. Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda	1			1		2
c. Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Pertama	2		5	3		9
ANALIS STANDARDISASI	5	4	5	3	6	23
a. Analis Standardisasi Ahli Madya						

b. Analis Standardisasi Ahli Muda	1		2	1	4	8
c. Analis Standardisasi Ahli Pertama	4	4	3	2	2	15
ARSIPARIS	2			2		4
a. Arsiparis Ahli Muda						
b. Arsiparis Ahli Pertama	2					2
c. Arsiparis Penyelia						
d. Arsiparis Mahir						
e. Arsiparis Terampil						
f. Calon Arsiparis Ahli Pertama				2		2
g. Calon Arsiparis Terampil						
PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN					1	1
a. Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil					1	1
PENGAWAS BENIH TANAMAN		1				1
a. Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda		1				1
b. Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama						
c. Pengawas Benih Tanaman Penyelia						
d. Pengawas Benih Tanaman Mahir						
e. Pengawas Benih Tanaman Terampil						
f. Pengawas Benih Tanaman Pemula						
PARAMEDIK KARANTINA HEWAN					2	2
a. Paramedik Karantina Hewan Mahir					1	1
b. Paramedik Karantina Hewan Terampil					1	1
PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN					6	6
a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya						
b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda					1	1
c. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama					5	5
PENGAWAS MUTU PAKAN					1	1
a. Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda						
b. Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama					1	1
c. Pengawas Mutu Pakan Penyelia						
d. Pengawas Mutu Pakan Terampil						
PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN					1	1
a. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Madya						

b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda						
c. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Pertama					1	1
d. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia						
e. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Mahir						
f. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil						
PENYULUH PERTANIAN		3				3
a. Penyuluh Pertanian Ahli Utama						
b. Penyuluh Pertanian Ahli Madya		1				1
c. Penyuluh Pertanian Ahli Muda		2				2
d. Penyuluh Pertanian Ahli Pertama						
e. Calon Penyuluh Pertanian Ahli Pertama						
PERENCANA	3					2
a. Perencana Ahli Madya	1					1
b. Perencana Ahli Muda						
c. Perencana Ahli Pertama	2					1
d. Calon Perencana Ahli Pertama						
PRANATA HUMAS	2					2
a. Pranata Humas Ahli Madya						
b. Pranata Humas Ahli Muda	1					1
c. Pranata Humas Ahli Pertama	1					1
d. Pranata Humas Mahir						
e. Pranata Humas Terampil						
PRANATA KEUANGAN APBN	1					1
a. Pranata Keuangan APBN Penyelia						
b. Pranata Keuangan APBN Mahir	1					1
c. Pranata Keuangan APBN Terampil						
PRANATA KOMPUTER	2	3		1		6
a. Pranata Komputer Ahli Muda						
b. Pranata Komputer Ahli Pertama	1	3		1		5
c. Pranata Komputer Mahir						
d. Pranata Komputer Terampil	1					1
e. Calon Pranata Komputer Ahli Pertama						

f. Calon Pranata Komputer Terampil						
PUSTAKAWAN			1		1	2
a. Pustakawan Ahli Madya						
b. Pustakawan Ahli Muda						
c. Pustakawan Ahli Pertama					1	1
d. Pustakawan Penyelia						
e. Pustakawan Mahir						
f. Pustakawan Terampil			1			1
g. Calon Pustakawan Ahli Pertama						
h. Calon Pustakawan Terampil						
TEKNISI LITKAYASA	10	6	25	7	10	58
a. Teknisi Litkayasa Penyelia	2	3	4	1	1	11
b. Teknisi Litkayasa Mahir	1		7		7	16
c. Teknisi Litkayasa Terampil	7	2	7	4	2	22
d. Teknisi Litkayasa Pemula		1	7	2		10
e. Calon Teknisi Litkayasa Terampil						
f. Calon Teknisi Litkayasa Pemula						

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 BBPSI SDLP



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN
JALAN TENTARA PELAJAR NO. 12, KAWASAN INOVASI PERTANIAN CIMANGGU, BOGOR 16114
TELEPON: (0251) 8323011 – 8323012, FAKSIMILI: (0251) 8311256
WEBSITE: www.sdip.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL: bsip_sdip@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Asdianto
Jabatan : Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Fadjry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka pendek maupun jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Fadjry Djufry

Jakarta, 31 Desember 2024

Pihak Pertama



Asdianto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	8 Standar
2	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian	81 (Nilai)
3	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian	94,44 (Nilai)

Kegiatan

Balai Besar Pengujian Standar Instrumen
Sumberdaya Lahan Pertanian

Anggaran

Rp. 15.754.506.000,-

Jakarta, 31 Desember 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Fadjry Djufry


Asdianto

Catatan :

1. Anggaran Program Nilai Tambah dan Daya Saing (*Kebijakan S-1023/MK.02/2024*) diblokir sebesar Rp. 32.190.000,-.
2. Anggaran Program Dukungan Manajemen (*Automatic Adjustment*) diblokir sebesar Rp. 517.230.000,-.

Lampiran 5. Manual IKU BBPSI SDLP BBPSI SDLP



MANUAL INDIKATOR KINERJA

Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen
Sumber Daya Lahan Pertanian

**BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN 2024**

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN

Sasaran Kegiatan (SK)	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian
Kode IKSK	01
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Jumlah rancangan standar instrumen sumber daya lahan pertanian yang dihasilkan
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Catatan jumlah rancangan standar instrumen sumber daya lahan pertanian yang dihasilkan pada tahun berjalan
Formula/Cara menghitung	Σ Hasil rancangan standar (RSNI3) instrumen sumber daya lahan pertanian yang dihasilkan pada tahun berjalan
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian
Cara pengambilan data	Menghitung rancangan standar sumber daya lahan pertanian yang dihasilkan berupa Rancangan Standar Nasional Indonesia 3 (RSNI3) pada tahun berjalan.
Catatan khusus	Hasil rancangan standar instrumen sumber daya lahan pertanian yang diukur untuk mengetahui capaian hasil kegiatan dan tidak sampai kepada dampak atas pemanfaatan hasil
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/sumber IKSK	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	
Sasaran Kegiatan (SK)	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
Kode IKSK	02
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Hasil evaluasi Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian
Formula/Cara menghitung	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dihitung menggunakan lembar kerja evaluasi berdasarkan Permen PANRB Nomor 90 Tahun 2021
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Unit Kerja masing-masing dan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Pembangunan ZI BSIP
Cara pengambilan data	Mendapatkan hasil penilaian Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) berdasarkan penilaian mandiri oleh satker masing-masing dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) oleh Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Pembangunan ZI BSIP
Catatan khusus	Penetapan WBK 1) Nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit 40; 2) Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% pada semua area pengungkit; 3) Nilai komponen hasil "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" minimal 18,25 dengan ketentuan nilai subkomponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal 15,75 atau minimal skor survei 3,60 serta nilai subkomponen "kinerja lebih baik" minimal 2,50 4) Nilai komponen hasil "Pelayanan publik yang prima" minimal 14,00 atau skor survei minimal 3,20 Penetapan WBBM 1) Nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 85 dengan minimal nilai pengungkit 48; 2) Bobot nilai per area pengungkit minimal 75% pada semua area pengungkit; 3) Nilai komponen hasil "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" minimal 19,50 dengan ketentuan nilai subkomponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal 15,75 atau minimal skor survei 3,60, serta nilai subkomponen "kinerja lebih baik" minimal 3,75 4) Nilai komponen hasil "Pelayanan publik yang prima" minimal 15,75 atau skor survei minimal 3,60
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/sumber IKSK	Tim internal di masing-masing Satker dan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Pembangunan ZI BSIP

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	
Sasaran Kegiatan (SK)	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas
Kode IKSK	03
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Nilai Kinerja Anggaran yang dihitung berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 dan dipublikasikan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan menggunakan Aplikasi Online SMART
Formula/Cara menghitung	Nilai Kinerja Anggaran dihitung secara otomatis dalam aplikasi SMART dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian
Cara pengambilan data	Melihat tampilan data pada <i>dashboard</i> aplikasi SMART yang <i>ter-update</i> secara otomatis sesuai dengan perkembangan 4 variabel penilaian, yaitu penyerapan anggaran, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, capaian rincian <i>output</i> , dan efisiensi
Catatan khusus	1. 90% > NK ≤ 100% dikategorikan Sangat Baik 2. 80% > NK ≤ 90% dikategorikan Baik 3. 60% > NK ≤ 80% dikategorikan Cukup atau Normal 4. 50% > NK ≤ 60% dikategorikan Kurang 5. NK ≤ 50% dikategorikan Sangat Kurang
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/sumber IKSK	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian

Lampiran 6. SK Penilaian Mandiri Zona Integritas (ZI) Tahun 2024



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 76 PSM
TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204, FAKSIMILI (021) 7800644
WEBSITE: www.bsip.pertanian.go.id e-mail: bsip@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
NOMOR 1441/KPTS/PW.410/H/12/2024

TENTANG

HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, telah dilakukan penilaian mandiri pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tentang Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

- 2 -

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

- 3 -

10. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
11. Keputusan Presiden Nomor 137/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN.

- 4 -

KESATU : Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2024 sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja	Nilai
1.	Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan	93,92
2.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner	93,53
3.	Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar	93,51
4.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	93,27
5.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo	92,19
6.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	92,17
7.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bengkulu	91,95
8.	Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil	91,48
9.	Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak	91,22
10.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian	91,11
11.	Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	91,11
12.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat	90,92
13.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi	90,63
14.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau	90,06
15.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	90,02
16.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Hias	89,89

- 5 -

No.	Satuan Kerja	Nilai
17.	Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura	89,40
18.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur	88,97
19.	Badan Informasi Standar Instrumen Pertanian	88,75
20.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan	88,65
21.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	88,54
22.	Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	88,36
23.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten	88,27
24.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sereal	88,25
25.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat	88,24
26.	Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	88,14
27.	Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Tanaman Aneka Kacang	88,11
28.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk	87,95
29.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bangka Belitung	87,79
30.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sayuran	87,62
31.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara	87,31
32.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara	87,16
33.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah	87,01
34.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar	86,64
35.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah	86,55
36.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua	86,54

- 6 -

No.	Satuan Kerja	Nilai
37.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma	86,39
38.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Buah Tropika	86,18
39.	Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	85,98
40.	Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian	85,91
41.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara	85,77
42.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan	85,62
43.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian DKI Jakarta	85,56
44.	Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian	85,53
45.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah	85,51
46.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat	85,40
47.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian	85,21
48.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat	85,15
49.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur	85,10
50.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku	84,74
51.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat	84,61
52.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali	84,03
53.	Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi	84,02
54.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian DI Yogyakarta	83,88

- 7 -

No.	Satuan Kerja	Nilai
55.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat	83,04
56.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh	82,94
57.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur	82,74
58.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat	82,19
59.	Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa	82,09
60.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung	82,11
61.	Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	81,21
62.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara	80,04
63.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan	80,02
64.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau	79,53

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2024



FADJRY DJUFRY
BADAN STANDARDISASI
INSTRUMEN PERTANIAN,

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Pusat dan Balai Besar Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
4. Arsip.

Lampiran 7. Indikator Pelaksanaan Anggaran

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Kode Satker : 237242 Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	023	018	237242	BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN	Nilai	100.00	83.20	94.70	92.00	100.00	100.00	100.00	95.62	100%	0.00	95.62
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.48	18.94	9.20	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	91.60	96.68				100.00					

hal : 1 dari 1 halaman

tanggal cetak : 14-01-25 03:46:16 oleh : ED1809

Lampiran 8. SK Tim Penyusun LAKIN BBPSI SDLP Tahun 2024



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN
JALAN TENTARA PELAJAR NO. 12, KAWASAN INOVASI PERTANIAN CIMANGGU, BOGOR 16114
TELEPON: (0251) 8323011 – 8323012, FAKSIMILI: (0251) 8311256
WEBSITE: www.sdlp.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL: bsip_sdlp@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN
Nomor: B-167/OT.050/H.8/01/2024

Tentang

TIM PELAKSANA LAPORAN KINERJA (LAKIN)
PADA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBER DAYA LAHAN
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa agar dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian dapat berjalan tertib, lancar dan akuntabel, perlu ditetapkan Tim Pelaksana Laporan Kinerja (LAKIN);
- b. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Laporan Kinerja (LAKIN) pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 245);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun

Lampiran : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian
 Nomor : B-167/OT.050/H.8/01/2024
 Tanggal : 15 Januari 2024

TIM PELAKSANA LAPORAN KINERJA (LAKIN)
 PADA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBER DAYA LAHAN
 PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Keterangan
1.	Dr. Ir. Rahmawati, M.M	Pengarah	Kepala Balai Besar
2.	Ibrahim Adamy Sipahutar, S.P., M.Sc	Penanggung Jawab	Ketua Kelompok Program dan Evaluasi
3.	Setiyo Purwanto, SP., M.Sc	Ketua	Ketua Tim Kerja Evaluasi
4.	Catur Nengsumoyo, S.Kom	Sekretaris	Ketua Tim Kerja Program
6.	Efi Hanafiah, S.IP	Anggota	Staf Program dan Evaluasi
7.	Agus Sudiana	Anggota	Staf Program dan Evaluasi
8.	Mufti Wirahadinata, A.Md	Anggota	Staf Program dan Evaluasi
10.	Fransiscus Benhardi Wastuwidya, S.T.P., M.T	Anggota	Staf Program dan Evaluasi
13.	Filan Hidayah, A.Md.P	Anggota	Staf Program dan Evaluasi
14.	Lady Hafidaty Rahma Kautsar, S.Si., M.Si	Anggota	Staf Program dan Evaluasi
15.	Adib Hasanawi, S.Si., M.T	Anggota	Staf Program dan Evaluasi
16.	Marlina, S.P	Anggota	Staf Program dan Evaluasi
17.	Najla Husnul Khotimah, A.Md.Si	Anggota	Staf Program dan Evaluasi
18.	Tulus Arizon Pratama Simanullang, A.Md	Anggota	Staf Program dan Evaluasi

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



166710071994032009

Lampiran 9. Nilai Efisiensi Kinerja Indikator Kinerja Utama BBPSI SDLP TA.2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian (4)=(3)/(2)*100	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian x Alokasi (7)=(4)x(5)	(Capaian x Alokasi) – Realisasi (8)=(7)-(6)	Efisiensi (9)=(8)/(5)*100	Nilai Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dhasilkan	8	9	112,50	1.867.810.000	1.863.942.570	2.101.286.250	237.343.680	12,70%	32,25%
Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian	81	85,21	105,20	347.712.000	347.579.603	365.793.024	18.213.421	5,23%	13,575%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian	94,44	95,62	101,25	11.721.668.000	10.562.646.734	11.868.188.850	1.305.542.116	11,13%	28,325%

Lampiran 10. Rencana Aksi BBPSI SDLP TA.2024

No	Sasaran Program	IKSK	Satuan	Target	Ukuran Keberhasilan (B03,B06,B09,B12)		Capaian		Evaluasi	Tindak Lanjut	Evidence
							Fisik	Persen			
1	Meningkatnya pengelolaan standar instrumen yang dihasilkan	Jumlah rancangan standar instrument yang dihasilkan	Standar	8	B03	- Koordinasi Penyusunan RSNI dengan Komite Teknis terkait - Penyusunan konsep RSNI TA.2024			- Terdapat blokir anggaran pada konsep rancangan dan rancangan standar untuk melakukan koordinasi konseptor	- Perlu melakukan penyusunan rencana strategis (substansi dan penganggaran) untuk rancangan standar - Koordinasi informal terlebih dahulu sebelum melakukan pertemuan koordinasi secara formal dengan Komtek 07-01	Output : SK PNPS, SK Tim Konseptor
					B06	- Rapat teknis 1 (3 judul RSNI1) - Jajak pendapat (1 judul RSNI3) - Penyusunan dan pematapan konsep rancangan SNI	1	35	- Terdapat blokir anggaran pada konsep rancangan dan rancangan standar untuk melakukan koordinasi konseptor - Belum dipersiapkan rancangan jadwal rapat teknis - Telah update anggaran RKAKL	- Perlu melakukan penyusunan rencana strategis (substansi dan penganggaran) untuk rancangan standar - Koordinasi informal terlebih dahulu sebelum melakukan pertemuan koordinasi secara formal dengan Komtek terkait untuk judul standar yang disusun - Telah melakukan koordinasi teknis dengan Komite Teknis terkait - Perlu melakukan percepatan penyusunan standar	Output : RSNI3 (1 Judul)
					B09	- Rapat consensus (8 judul RSNI3) - Penetapan (1 judul RSNI3)	9	85	- Terdapat blokir anggaran pada konsep rancangan dan rancangan standar	- Perlu melakukan penyusunan rencana strategis (substansi dan penganggaran) untuk rancangan standar	Output : RSNI3 (9 Judul)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										BSN untuk jajak pendapat - Koordinasi untuk penyusunan RASNI dengan BSN	
2	Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi layanan prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian	Nilai	81	B03	Persiapan dokumen unuk penilaian ZI				Mendata dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk penilaian ZI	Literatur terkait penilaian ZI
					B06	Persiapan dokumen unuk penilaian ZI				Kompilasi dokumen yang dibutuhkan untuk penilaian ZI berkoordinasi dengan seluruh bidang/bagian terkait	Dokumen yang dibutuhkan untuk penilaian ZI
					B09	Persiapan dokumen unuk penilaian ZI			Terdapat beberapa dokumen yang belum terdokumentasi dengan baik	Mencari dokumen yang belum terdokumentasi	Dokumen yang dibutuhkan untuk penilaian ZI
					B12	Sudah dilaksanakan penilaian ZI pada satker BBPSI SDLP dengan target nilai 81			validasi eviden ZI perlu dipersiapkan oleh tim gabungan		SK hasil penilaian ZI
3	Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian	Nilai	94,44	B03	Melaksanakan entri capaian output pada aplikasi SAKTI dan validasi realisasi anggaran dari masing-masing kegiatan			> koordinasi antar operator di eveluasi dan keuangan > Aplikasi SAKTI Maintenance	rekonsiliasi antar operator di evaluasi dan keuangan untuk input realisasi anggaran dan fisik	Input Data yang dimaksud: Data Aplikasi Smart dan SAKTI, serta Realisasi RO dan KRO (persentase : nilai realisasi/nilai target akhir tahun)
					B06	Melaksanakan entri capaian output pada aplikasi SAKTI dan validasi realisasi anggaran dari masing-masing kegiatan			> koordinasi antar operator di eveluasi dan keuangan > Aplikasi SAKTI Maintenance	rekonsiliasi antar operator di evaluasi dan keuangan untuk input realisasi anggaran dan fisik	Input Data yang dimaksud: Data Aplikasi Smart dan SAKTI, serta Realisasi RO dan KRO (persentase : nilai realisasi/nilai target akhir tahun)
					B09	Melaksanakan entri capaian output pada			> koordinasi antar operator di eveluasi	rekonsiliasi antar operator di evaluasi dan	Input Data yang dimaksud:

						aplikasi SAKTI dan validasi realisasi anggaran dari masing-masing kegiatan			dan keuangan > Aplikasi SAKTI Maintenance	keuangan untuk input realisasi anggaran dan fisik	Data Aplikasi Smart dan SAKTI, serta Realisasi RO dan KRO (persentase : nilai realisasi/nilai target akhir tahun)
					B12	Updating data pada aplikasi SPANT dan SMART DJA menghasilkan Nilai IKPA dan NKA pada dashboard aplikasi			> koordinasi antar operator di evaluasi dan keuangan > Aplikasi SAKTI Maintenance	rekonsiliasi antar operator di evaluasi dan keuangan untuk input realisasi anggaran dan fisik	Input Data yang dimaksud: Data Aplikasi Smart dan SAKTI, serta Realisasi RO dan KRO (persentase : nilai realisasi/nilai target akhir tahun)



BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN
JL. TENTARA PELAJARNO. 12, KAWASAN INOVASI PERTANIAN CIMANGGU, BOGOR 16114
TELEPON: (0251) 8323011- 8323012, FAXSIMIL:(0251) 8311256
WEBSITE: WWW. SDLP. BSIP. PERTANIAN. GO. ID E- MAIL: BSIP. SDLP@ PERTANIAN. GO. ID